



## KAJIAN MANAJEMEN BIAYA PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PADA PERGURUAN TINGGI BIDANG MARITIM

*Teguh Purnomo<sup>1\*</sup>, Nafi Almuzani<sup>2</sup>, Darul Prayogo<sup>1</sup>, Abdi Seno<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Program Teknika, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Indonesia

<sup>2</sup>Program Teknika, Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Indonesia

Correspondence: \*E-mail: [Teguhaip56@gmail.com](mailto:Teguhaip56@gmail.com)

### ABSTRACTS

The purpose of the research is review the cost of education on the ability to pay and assessment of student satisfaction in universities, especially in the maritime field. Research is outlined in the description taken data from several information retrieval techniques, further literature studies are used as support for narrative development. The results illustrate students provide a good assessment of the cost of education and the quality of services held but the concept of budgeting mechanisms is still not affordable information by students. To improve the quality of service quality, in accordance with applicable regulations and policies, in the implementation of monitoring and evaluation of service quality, agencies/educational institutions are required to take customer satisfaction assessment. In the development of realizing a quality education, of course the implementation will not be separated from the financing element. In universities, the cost of education is still a major issue in the implementation of education. The benefits of the research are expected to contribute information to the mechanism of cost budgeting and improvement of education services as well as provide an understanding of the importance of balance of education costs, quality of education services and become a reference for further research from observations.

**Keywords:** Education Costs, Maritime Affairs, Quality of Service.

### ARTICLE INFO

**Article History:**

*Submitted/Received 14 Feb 2021*

*First Revised 02 Mar 2021*

*Accepted 10 Aug 2021*

*First Available online 16 Aug 2021*

*Publication Date 01 Oct 2021*

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu elemen penting untuk mencetak generasi para penerus bangsa. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan peningkatan pembangunan dari berbagai bidang sehingga untuk jangka panjangnya akan berpengaruh pada cerminan kualitas bangsa. Seperti yang tercantum pada Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjabarkan bahwa tujuan Negara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa Negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi kehidupannya (Ulpha, 2016; Eko, 2016; Ferdi, 2013).

Dimasa sekarang, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak sangat terbuka, hal ini disebabkan karena sudah mulai banyak bermunculan jasa-jasa pendidikan disertai dengan bantuan/ beasiswa penyelenggaraannya, sehingga calon peserta didik dapat memperoleh harapan dan layanan yang baik dalam mengkonsumsi produk jasa pendidikan tersebut (Gamar, 2019). Perkembangan pendidikan khususnya pada perguruan tinggi tidak lepas dari suatu komitmen Instansi/lembaga penyelenggara pendidikan dalam mewujudkan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Berbagai faktor terbentuknya pendidikan dengan nilai yang berkualitas berasal dari beberapa hal seperti kurikulum/ materi pembelajaran, sarana dan prasarana, peranan sumber daya manusia dan hal-hal lainnya. Dari berbagai faktor tersebut, tentunya diperlukan banyak dukungan untuk menunjang perkembangannya, salah satunya adalah biaya pendidikan.

Dalam artikelnya, Togatorop (2017) mengatakan “bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu maka tidak bisa dilepaskan dari berbagai unsur, salah satunya adalah unsur pembiayaan”. Selanjutnya Atmojo (2016) mengatakan bahwa biaya pendidikan merupakan seluruh pengeluaran, pengeluaran tersebut adalah berupa uang maupun yang bukan uang sebagai bentuk tanggung jawab dari semua pihak terkait (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan, hal tersebut agar tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai secara efisien dan efektif, yang harus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif.

Penyelenggaraan pendidikan tentunya merupakan suatu harapan dalam pengembangan dan pembentukan potensi sumber daya manusia. Ferdi (2013) mengungkapkan terhadap pembentukan potensi SDM, penggunaan suatu biaya pendidikan secara efektif dan efisien adalah suatu hal yang diharapkan menghasilkan SDM yang sesuai tepat dan keberhasilan gunanya. Salah satu kunci peranan keberhasilan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan adalah terletak pada kemampuan dari keseluruhan SDM dalam melakukan pengeloaan dana yang tersedia dengan berpedoman pada suatu kebutuhan pokok dan skala prioritas dari program pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program tersebut (Yayuk, 2019; Lubis, 2019; Murti, 2019).

Biaya pendidikan pada perguruan tinggi masih menjadi aspek pertimbangan ketika calon peserta didik menentukan pilihan melanjutkan jenjang pendidikannya. Berbagai program studi dan jalur yang ditawarkan ikut mempengaruhi timbulnya biaya pendidikan. Jika dicermati, biaya pendidikan semakin tahun semakin meningkat, hal ini turut diikuti dari dampak harga pasar dan perkembangan ekonomi serta lainnya. Namun masyarakat Indonesia sendiri tentunya tetap berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan di perguruan tinggi masih banyak yang memerlukan dukungan

biaya yang tidak sedikit. Selain diikuti dampak harga pasar dan perkembangan ekonomi, biaya pendidikan yang tidak sedikit tersebut juga dipengaruhi oleh banyak penyebab dari segi internal penyelenggara pendidikan yang mengakibatkan keluarnya pembiayaan yang tinggi dalam menjalankan prosesnya. Jenjang pendidikan dengan waktu yang lama pada perguruan tinggi serta penyelenggaraan pendidikan yang mempunyai kekhususan pada program studi lebih sering dijumpai dengan biaya yang relatif tinggi. Selanjutnya untuk mendapatkan penyelenggaraan yang bermutu, selain unsur pembiayaan yang menjadi persoalan, sistem penganggaran biaya juga turut menjadi permasalahan. Sistem penganggaran biaya masih menjadi isu disebuah instansi/lembaga pendidikan. Mekanisme penganggaran yang seimbang dapat memungkinkan akan berpengaruh terhadap kelancaran proses pendidikan.

Dari permasalahan isu tersebut, beberapa hal perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam unsur pembiayaan seperti mekanisme penganggaran dengan keringanan biaya dan tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan dari peserta didik. Instansi/lembaga penyelenggara pendidikan dengan biaya yang tinggi tentunya akan dituntut dengan mutu pelayanan yang baik dan berkualitas. Penilaian kepuasan peserta didik tersebut tentunya juga harus memenuhi beberapa unsur untuk dapat dikatakan bahwa karakteristiknya telah memenuhi penilaian yang baik.

Dari pengamatan penulis, penulis meninjau program pendidikan dibidang maritim. Pada perguruan tinggi dibidang maritim terdapat penyelenggara dari negeri dan swasta dengan jenjang pendidikan berada pada Diploma III dan Diploma IV yang terdiri dari beberapa program studi. Namun penulis memfokuskan pengamatan pada satu perguruan tinggi negeri untuk menganalisa secara dini terhadap biaya dan tingkat kepuasan peserta didik. Tingkat minat peserta didik pada perguruan tinggi dibidang maritim sangat antusias namun masih terdapat isu pada permasalahan biaya pendidikan. Penyelenggara pendidikan yang diamati oleh penulis menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Diploma IV dengan jalur regular dan mandiri pada perguruan tinggi negeri. Penulis menganalisa tingkat kepuasan pelayanan dan biaya dari peserta didik tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan ataupun praktis khususnya pada perguruan tinggi dalam bidang maritim.

Kajian yang diharapkan penulis selain menganalisa kemampuan biaya dan tingkat kepuasan dari peserta didik juga diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan terhadap manajemen penyelenggara pendidikan khususnya pada mekanisme peningkatan pelayanan dan penganggaran biaya pendidikan selanjutnya dapat memberikan manfaat secara praktis untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada civitas akademik perguruan tinggi yang diteliti untuk memahami pentingnya keseimbangan biaya pendidikan dan kualitas layanan pendidikan serta menjadi penelitian lebih lanjut dari hasil penelitian ini.

## **2. METODE PENELITIAN**

Pada pengamatan yang dilakukan penulis, penulis melakukan pendekatan dengan mengumpulkan data yang selanjutnya diolah sesuai ketentuan. Beberapa informasi yang menjadi peranan dukungan penulisan ini dilakukan dengan beberapa teknik untuk pengumpulan dan pengolahan data, adapun teknik yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Kajian literatur yaitu referensi berupa kajian teori yang dikutip dari penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan penulis dalam mengelola penulisan untuk menjadi narasi informasi.
- 2) Observasi yaitu teknik pengamatan yang dilakukan langsung. Pada hal ini penulis melakukan tinjauan langsung di lapangan dengan melakukan teknik survey kepada para peserta didik, khususnya pada peserta didik jalur reguler dan mandiri serta meninjau berbagai data pembiayaan untuk peserta didik;

Selanjutnya pada jenis penelitian yang berupa survei ini, penulis menggunakan suatu pendekatan kuantitatif serta pengolahan dari analisis deskriptif. Suatu penelitian survey, sebagaimana penelitian survei yang diungkapkan adalah penelitian yang dilakukan pada kepada populasi, baik populasi yang besar ataupun kecil, selanjutnya data yang dipelajari adalah data sampel dari populasi tersebut, yang disebut dengan responden sehingga ditemukan suatu analisa kejadian yang relatif, distribusi, dan memiliki hubungan pada antar variabel psikologis dan sosiologis.

Selanjutnya di mana diungkapkan bahwa metode deskriptif merupakan Metode untuk meneliti status dari sekelompok manusia, objek, seluruh kondisi dan sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Dari beberapa teknik tersebut, selanjutnya data diolah menjadi kajian informasi yang terstruktur dan sistematis pada pembahasan untuk dapat disimpulkan menjadi kajian teoritis dalam penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. HASIL PENELITIAN**

Waktu Penyelesaian Pembahasan dari hasil penelitian adalah kajian yang mengungkapkan hasil temuan yang saling ada hubungannya dengan jawaban terhadap pertanyaan penelitian (Azhari et al., 2016). Pada hasil dan pembahasan menulis menyajikan dengan 3 (tiga) penyajian, yaitu data pembiayaan pada program studi jalur reguler dan mandiri, hubungan antara biaya pendidikan dengan kemampuan bayar, dan hubungan antara biaya pendidikan dengan penilaian kepuasan.

#### **Data Pembiayaan pada Program Studi pada Jalur Reguler dan Mandiri**

Pada tempat penelitian yang diamati oleh penulis, Instansi/ Lembaga penyelenggara pendidikan yaitu Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Instansi tersebut memiliki penyelenggaraan pendidikan dengan jenjang program pendidikan Diploma-IV (empat) bidang pelayaran yang terdiri dari 3 (tiga) Program Studi (prodi) pada pendidikannya yaitu Program Studi Nautika, Program Studi Teknika dan Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK). Pada Program Studi Nautika dan Teknika, peserta didik selain mendapatkan ijazah pada gelar Diploma/ Sarjananya juga akan mendapatkan ijazah kompetensi kepelautan Tingkat III (tiga) dan didukung oleh sertifikat pelatihan dasar sedangkan untuk Program Studi KALK, maka akan diberikan tambahan sertifikat profesi. Ketiga prodi tersebut sama sama menempuh jenjang selama 8 (delapan) semester. Setiap peserta didik akan tinggal di asrama selama 4 (empat) semester dalam mengikuti pembelajarannya, 2 (dua) semester Praktek Laut (Prala) dan Praktek Darat (Prada) di Instansi/Lembaga/Perusahaan yang telah bekerjasama dan dilanjutkan kembali 2 (dua) semester pembelajaran disemester 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tanpa diasramakan.

Untuk menempuh pendidikan di PIP Semarang, terdapat 3 (tiga) jalur program yang berbeda yaitu Jalur Pola Pembibitan, Jalur Reguler dan Jalur Mandiri. Penawaran prodi tersebut tentunya mempunyai biaya pendidikan yang bervariasi. Pada jalur pola pembibitan, peserta didik tidak dikenakan biaya semester dikarenakan sudah ditanggung melalui beasiswa pola pembibitan, sedangkan untuk jalur reguler dan mandiri, peserta didik membayar setiap komponen penganggaran pendidikan yang telah ditetapkan oleh PIP Semarang, namun besarnya berbeda, harga pada jalur mandiri lebih besar dibandingkan dengan jalur reguler dikarenakan ada komponen yang sepenuhnya dibayarkan ke peserta didik.

Pada pengamatan, penulis hanya mengambil penelitian kepada peserta didik pada jalur reguler dan mandiri, dikarenakan tidak ada pembiayaan yang ditanggung penuh oleh pihak lain yaitu semester seperti peserta didik pada pola pembibitan, sehingga data yang diambil adalah data yang didapatkan untuk program studi jalur reguler dan mandiri. Berikut adalah besaran biaya yang ditanggung oleh peserta didik dalam menempuh pendidikan di PIP Semarang, biaya dibawah ini adalah biaya diluar perhitungan sertifikat pelatihan, karena setiap program studi mendapatkan jumlah dan jenis pelatihan yang berbeda sehingga penulis hanya mengambil sample biaya pokok rutinitas untuk menempuh program studi tersebut, Adapun biaya yang penulis maksud ditampilkan pada **Tabel 1** di bawah ini.

**Tabel 1.** Biaya pendidikan Program Studi Nautika, Teknika dan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan Reguler dan Mandiri

NO	PEMBIAYAAN	BESARAN PEMBIAYAAN DIPLOMA IV 2020	
		JALUR REGULER	JALUR MANDIRI
1	Tahapan Seleksi	Rp1.750.000	Rp1.750.000
2	Daftar Ulang/Biaya Pendidikan Awal	Rp32.629.000	Rp39.459.000
3	Semester 2 (dua)	Rp1.435.000	Rp9.982.000
4	Semester 3 (tiga)	Rp3.410.000	Rp9.992.000
5	Semester 4 (empat)	Rp1.860.000	Rp10.432.000
6	Semester 5 (Lima) dan Semester 6 (enam)	Rp1.747.000	Rp1.340.000
7	Semester 7 (tujuh)	Rp3.220.000	Rp10.156.000
8	Semester 8 (delapan)	Rp2.520.000	Rp7.634.000
<b>Total</b>		<b>Rp48.571.000</b>	<b>Rp90.745.000</b>

- Biaya belum termasuk perlengkapan bawaan yang wajib dibawa saat masuk asrama, ujian/ ujian ulang pra dan pasca prala, buku pelaut dan passport, sertifikat pelatihan, wisuda
- biaya Laundry yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp.124.000,- pada Program Reguler dan Mandiri
- biaya Permakanan (dibayarkan rutin perbulan) sebesar Rp.1.500.000,- pada Program Reguler dan Mandiri

Berdasarkan **Tabel 1** (bersumber <https://pip-semarang.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/daftar-biaya-diploma-4.pdf> diakses pada 3 Januari 2021) di atas maka dapat dijelaskan bahwa, biaya yang telah ditetapkan tentunya terdapat sebuah proses penganggaran biaya. Menurut [yuliani \(2016\)](#) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran;
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam bentuk uang, jasa dan barang;
- c. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial;
- d. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu;
- e. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang;
- f. Melakukan revisi usulan anggaran;
- g. Persetujuan revisi usulan anggaran;
- h. Pengesahan anggaran.

Dalam status kelembagaan, PIP Semarang merupakan Perguruan Tinggi Negeri pada Bidang Maritim dibawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan yang telah menjadi Instansi Badan Layanan Umum, dalam penyelenggaraannya, pembiayaan pada PIP Semarang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK/05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Dengan demikian, pembiayaan pada PIP Semarang terstruktur dan sistematis pada peraturan dan kebijakan yang berlaku.

### **Hubungan antara Biaya Pendidikan dengan Kemampuan Bayar**

Pembiayaan adalah salah satu dari beberapa bagian yang menjadi sumber daya secara langsung dalam menunjang suatu efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan pendidikan. Pembiayaan masih menjadi isu utama dalam dunia pendidikan ketika peserta didik memilih suatu pendidikan, namun hal tersebut bukan semata menghalangi para peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang dituju tersebut. Dari permasalahan tersebut pentingnya peranan implementasi kebijakan Instansi/Lembaga penyelenggara pendidikan dalam mengelola penganggaran biaya menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. implementasi terhadap kebijakan dalam manajemen pembiayaan yang seimbang dan optimal dapat meningkatkan mutu suatu Instansi/Lembaga pendidikan.

Merujuk kepada [Ferdin \(2013\)](#), biaya pendidikan terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

#### a) Biaya Langsung dan Tidak Langsung

Biaya langsung mencakup gaji guru dan administrator, petugas bimbingan dan penyuluhan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, material, tanah, dan bangunan sedangkan Biaya tidak langsung mencakup semua ongkos dan pengeluaran yang secara tidak langsung dipergunakan untuk kegiatan proses pendidikan seperti penghapusan dan keausan bangunan, pajak yang harus dibayar, dan insentif bagi pegawai;

#### b) Biaya pribadi dan Sosial.

Biaya pribadi pendidikan adalah ongkos dan pengeluaran yang dipikul oleh perorangan atau keluarga untuk mengikuti pendidikannya, antara lain pembelian buku, alat tulis, angkutan dan pemondokan sedangkan biaya sosial pendidikan ialah biaya pribadi ditambah biaya yang ditanggung oleh masyarakat, antara lain hasil

pemungutan pajak yang dipergunakan untuk pendidikan, sumbangan, atau hibah dari masyarakat;

c) Biaya Moneter dan Non Moneter.

Biaya moneter, yaitu biaya yang berbentuk atau dapat dihitung berdasarkan nilai keuangan. Biaya non moneter yaitu biaya yang tidak bersifat keuangan, Seperti pendapatan hilang atau kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan (mendapatkan uang) karena mengikuti kegiatan proses pendidikan.

Secara garis besarnya biaya pendidikan dari pemerintah itu terdiri dari dua jenis, yaitu biaya rutin dan biaya pembangunan. Pendanaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam PP No 48 tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan dibagi menjadi tiga antara lain:

- a. Biaya Satuan Pendidikan, yaitu biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
- b. Biaya Penyelenggaraan dan/ atau Pengelolaan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemprov, pemko/ pemkab, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat/ Yayasan;
- c. Biaya Pribadi Peserta Didik, adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk memudahkan suatu pembayaran dari peserta didik ketika menempuh pendidikan, tentunya beberapa instansi/ Lembaga pendidikan memiliki beberapa model dalam pembiayaan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh [Winarsih \(2016\)](#), menyatakan bahwa ada beberapa model biaya pendidikan yang harus difahami oleh satuan pendidikan. Model-model biaya pendidikan tersebut diantaranya yaitu:

- a. Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*);
- b. Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*);
- c. Model Perencanaan Pajak jaminan Pajak (*Guaranted Tax Base Plan*);
- d. Model Persamaan Persentase (*Persentage Equalizing Model*)
- e. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*);
- f. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Model*);
- g. Model Sumber Pembiayaan (*the Resources Cost Model*);
- h. Model Surat Bukti/penerima (*Models of Choice and Voucher plans*);
- i. Model Rencana Bobot Siswa (*Weight Student Plan*);
- j. Model berdasar Pengalaman (*Historic Funding*);
- k. Model berdasarkan Usulan (*Bidding Model*);
- l. Model berdasarkan Kebijakan (*Descretion Model*).

Adapun berkaitan dengan hal yang amat penting adalah responden. Peneliti mengambil 230 responden, rincian responden ditampilkan pada **Tabel 2** berikut ini.

**Tabel 2.** Jumlah responden peserta didik program reguler dan [rogram mandiri

NO	JUMLAH RESPONDEN		
	TINGKAT I (SEMESTER II)	TINGKAT II (SEMSETER IV)	TINGKAT VII (SEMESTER VII DAN VIII)
<b>Program Reguler</b>			
1	50	50	130
Jumlah responden program reguler			230
<b>Program Mandiri</b>			
2	80	75	
Jumlah responden program mandiri			155

Berdasarkan **Tabel 2** di atas, peneliti meyakini setiap kreteria yang tertuang dalam teori sudah mencukupi. Sehingga informasi yang di dapatkan melalui responden ini memenuhi unsur-unsur penelitian dan melahirkan penelitian yang akurat. Pada pengambilan survei, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilakukan dengan mekanisme membagikan angket ke responden. Adapun hasil survei dianalisa dengan penilaian secara perbandingan yang selanjutnya hasil tersebut menjadi sebuah kajian dan kesimpulan deskriptif dalam penentuan hasil survei. Pada pembahasan ini penulis memberikan pertanyaan survei yang ditujukan kepada responden sebagaimana pada **Tabel 3** berikut ini.

**Tabel 3.** Pertanyaan survei pada program jalur reguler dan mandiri

NO	PERTANYAAN	BENTUK JAWABAN
1	Apakah biaya pendidikan semester (termasuk permakanan dan laundry) terjangkau dengan penghasilan dari penanggungjawab biaya pendidikan selama di PIP Semarang?	A. Iya B. Tidak
2	Apakah penanggungjawab biaya keberatan dengan biaya semester (termasuk permakanan dan laundry) yang ditetapkan oleh PIP Semarang?	A. Iya B. Tidak
3	Apakah penanggungjawab biaya memiliki penghasilan tambahan diluar penghasilan tetap?	A. Iya B. Tidak
4	Apakah penanggungjawab biaya telah memiliki simpanan biaya yang dialokasikan untuk pendidikan yang akan saudara tempuh hingga jangka waktu kedepan (sampai dengan lulus)?	A. Iya B. Tidak
5	Apakah saudara pernah meminta mengajukan keringanan biaya pendidikan?	A. Iya B. Tidak
6	Menurut saudara biaya apa yang perlu pip semarang sesuaikan harganya dari Program Diploma IV Reguler/ Mandiri PIP Semarang?	Jawaban Singkat
7	Menurut saudara alasan apa yang mengharuskan adanya keringanan biaya pendidikan pada Program Diploma IV Taruna Reguler/ Mandiri PIP Semarang?	Jawaban Singkat

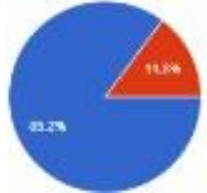
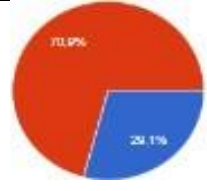
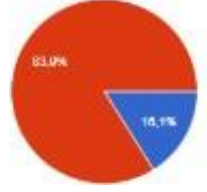
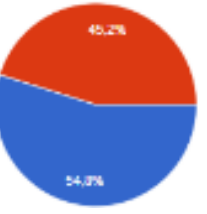
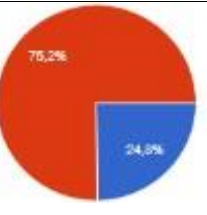


Berdasarkan **Tabel 3**, menunjukkan ada tujuh pertanyaan survey yang diberikan kepada responden dalam penelitian ini, pertanyaan yang ada di atas telah dilakukan validasi dan reability terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap responden penelitian.

**Hasil Survei Peserta Didik Program Reguler**

Pada survei peserta didik program reguler, diamati kepada peserta didik Tingkat I, II dan IV. Survei dilakukan untuk mengetahui penilaian peserta didik program reguler terhadap tarif yang berlaku di PIP Semarang. Peserta didik program reguler adalah peserta didik yang pembiayaannya masih dibawah tarif daripada program mandiri. Peserta didik program reguler mendapatkan tarif yang jauh lebih murah dikarenakan pembiayaannya pendidikan masih terbantu oleh anggaran rupiah murni pada pagu anggaran PIP Semarang setiap tahunnya. Selanjutnya untuk tetap mengetahui penilaian peserta didik maka tetap dilakukan survei ini, hal ini ditujukan agar mendorong analisa secara dini terhadap peserta yang kurang mampu meskipun yang bersangkutan telah mengikuti program jalur reguler. Adapun hasil survei tersebut adalah sebagaimana **Tabel 4** berikut .

**Tabel 4.** Hasil survei peserta didik program reguler

PERTANYAAN KE-	HASIL
1	 <p>83,2% IYA 16,8% TIDAK</p>
2	 <p>70,9% TIDAK 29,1% IYA</p>
3	 <p>83,0% TIDAK 17,0% IYA</p>
4	 <p>45,2% TIDAK 54,8% IYA</p>
5	 <p>75,2% TIDAK 24,8% IYA</p>

Berdasarkan **Tabel 4** dapat dijelaskan bahwa, pada pengamatan survei yang dilakukan ke peserta program reguler, menggambarkan bahwa pada analisa terhadap keterjangkauan tarif harga layanan akademik yaitu biaya semester, permakanan dan *laundry* menyatakan 85,2% dari 230 responden keseluruhan menunjukkan harga layanan dapat terjangkau.

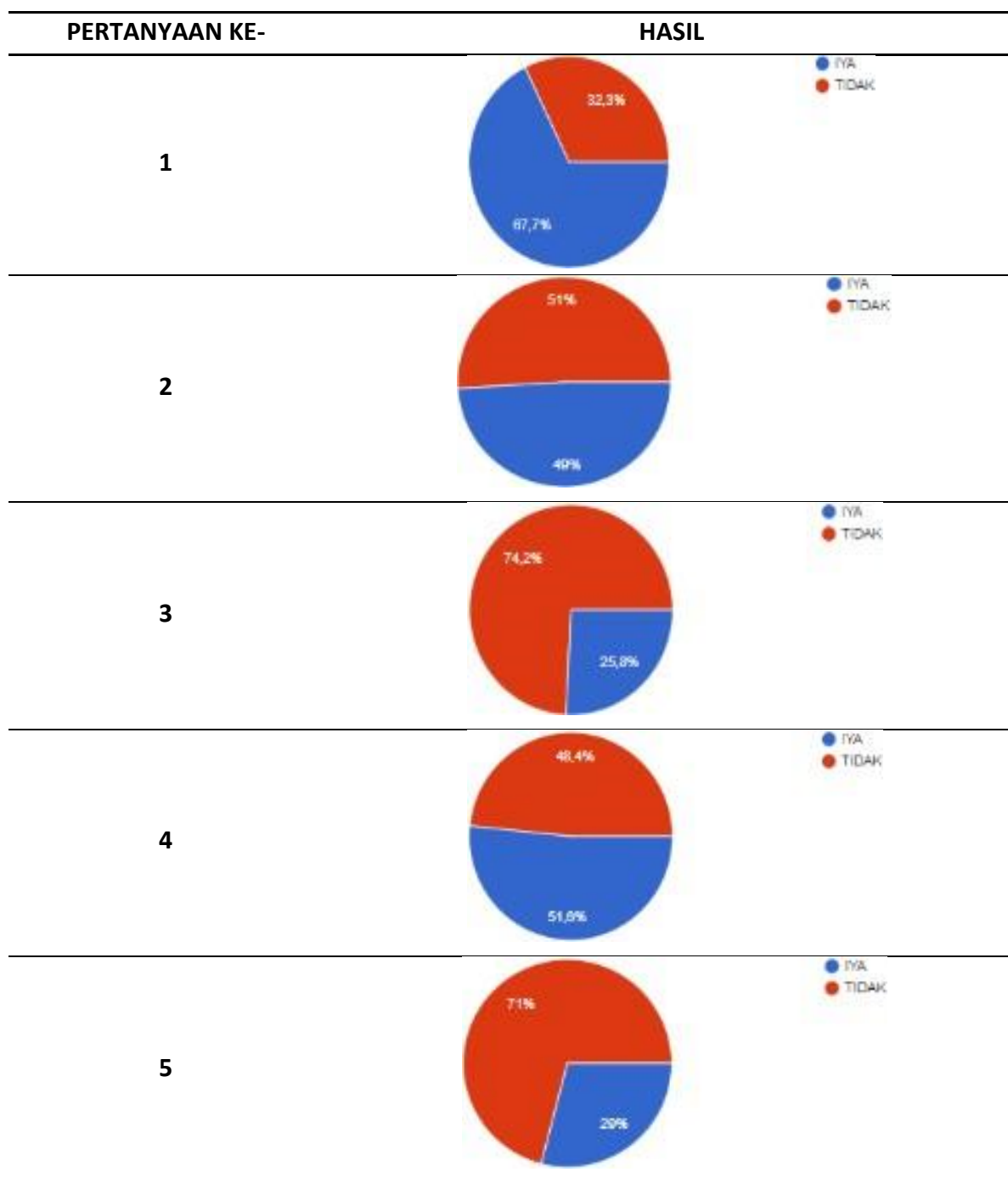
Selanjutnya, survei mengamati terhadap penghasilan tambahan dari penanggung jawab dan ketersediaan simpanan biaya untuk peserta didik menunjukkan bahwa 83,9% responden mengatakan penanggung jawab biaya memiliki penghasilan tambahan untuk membiayai peserta didik dalam menempuh pendidikannya, namun dalam pengamatan ini, penulis tidak mengamati lebih dalam lagi terhadap aktifitas/pekerjaan dari penghasilan tambahan tersebut. Sedangkan untuk simpanan biaya pendidikan, penulis mensurvei hal tersebut diperuntukan untuk mengetahui keterbatasan cadangan biaya pembayaran pendidikan. Hasilnya mengungkapkan bahwa 54,8% dari penanggungjawab biaya memiliki simpanan biaya hingga sampai peserta didik lulus. Survei pengamatan simpanan biaya tersebut juga dapat dijadikan acuan bahwa penanggung jawab peserta didik akan sepenuhnya mampu melunasi biaya pendidikan selama pendidikan.

Pengamatan selanjutnya yang dilakukan penulis adalah mensurvei kepada peserta didik dalam pengajuan keringan biaya, hasilnya 75,2% responden mengatakan bahwa tidak pernah mengajukan keringanan biaya. Pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Instansi memberikan kesempatan secara terbuka untuk pengajuan keringan biaya. PIP Semarang selaku penyelenggara pendidikan juga memberikan kesempatan ke peserta didik untuk mendapatkan beasiswa berprestasi atau beasiswa bantuan kurang mampu kepada peserta didik. Ditinjau dari pengamatan tersebut menunjukkan bahwa peserta didik pada program reguler tidak memiliki kendala yang signifikan terhadap tarif layanan akademik karena penulis menilai bahwa lebih dari 50% tidak ada keberatan atau adanya kemampuan biaya terhadap tarif layanan yang ditetapkan oleh PIP Semarang untuk program diklat pembentukan reguler.

Pengamatan selanjutnya penulis mengamati berupa pertanyaan singkat terhadap biaya yang perlu disesuaikan dan alasannya. Dari beberapa pengamatan, penulis mengambil jawaban yang cukup banyak dalam menilai pertanyaan tersebut, hasilnya bahwa banyak peserta didik program reguler yang sudah cukup puas terhadap biaya/ tarif layanan diklat pembentukan reguler, sedangkan responden tetap memerlukan adanya keringanan biaya karena di masa pandemic Covid-19 peserta didik program reguler mengungkapkan bahwa ekonomi di masa pandemi ini cukup menjadi perhatian yang diutamakan terhadap hubungannya dengan biaya pendidikan.

### **Hasil Survei Peserta Didik Program Mandiri**

Pada survei peserta didik program mandiri, yang diamati adalah kepada peserta didik Tingkat I, II. Pengamatan ini dilakukan berbeda karena pada program mandiri belum terdapat Tingkat IV (empat) pada peserta didik. Adapun hasil pengamatan adalah sebagai **Tabel 5** berikut.



Berdasarkan **Table 5** di atas, maka dapat dijelaskan bahwa, pada hasil pengamatan selanjutnya, penulis mengevaluasi hasil pengamatan pada diklat pembentukan program mandiri. Responden yang diambil sebanyak 155 responden ini memberikan hasil survei peserta didik. Peserta didik program mandiri adalah peserta yang mendapatkan tarif layanan yang berbeda dengan program reguler dan program pola pembibitan. Peserta didik program mandiri mendapatkan tarif yang lebih mahal dikarenakan tidak ada subsidi dari anggaran rupiah murni. Pada tempat penelitian, Meskipun program mandiri membayar jauh lebih tinggi dari program lainnya, fasilitas dan produk pendidikan yang didapatkan sama dengan program reguler dan pola pembibitan.

Keadaan demikian memang merupakan hal yang wajar seperti yang diungkapkan sebelumnya, program mandiri adalah sepenuhnya membayar tanpa bantuan subsidi, namun

dalam hal ini penulis tetap mengamati kemampuan bayar pada program mandiri yang diharapkan dapat mengevaluasi kemampuan bayar/tarif layanan sehingga peningkatan mutu/kualitas dan kepuasan peserta didik tetap termonitoring dan dapat ditingkatkan.

Pada pengamatan yang dilakukan penulis, 67,7% responden menyatakan bahwa tarif layanan diklat pembentukan program mandiri adalah terjangkau. Dalam hasil ini artinya lebih dari setengah responden mengungkapkan harga yang terjangkau namun untuk sisanya masih cukup besar dalam presentasinya untuk menilai tarif harga layanan tersebut dalam hal yang tidak terjangkau. Tentunya hal ini menjadi turut perhatian karena berbeda dengan program reguler yang tingkat keterjangkauan harganya diungkapkan sebanyak 85,2% dari responden yang disurvei.

Selanjutnya dalam pengamatan terhadap penghasilan tambahan dari penanggung jawab biaya serta simpanan biaya penanggung jawab untuk menempuh Pendidikan dari peserta didik, didapatkan hasil bahwa 74,2% responden, penanggung jawab biaya tidak memiliki penghasilan tambahan untuk membantu biaya Pendidikan peserta didik yang ditanggungnya sedangkan sebanyak 51,6%, penanggung jawab biaya memiliki simpanan biaya untuk peserta didiknya. Hal tersebut sangat berbeda jauh dengan presentase hasil pada program mandiri. Keseimbangan penghasilan tambahan dan simpanan biaya merupakan hal yang patut diperhatikan mengingat tarif/ biaya pada program mandiri sangat tinggi daripada program reguler.

Pengamatan selanjutnya adalah pada penilaian peserta didik terhadap pengajuan keringanan biaya. Hasilnya sebesar 71% responden mengungkapkan tidak pernah mengajukan keringanan biaya pada Instansi/Lembaga. Kemudian pengamatan yang dilakukan oleh penulis selanjutnya adalah terhadap pertanyaan tentang biaya yang perlu dilakukan penyesuaian dan alasannya. Dari hasil survei yang dilakukan bahwa cukup tinggi penilaian dari program mandiri untuk meminta penurunan biaya pada tarif/ biaya semester, hal tersebut berargumentasi bahwa yang didapatkan selama menempuh pendidikan adalah sama dengan program reguler artinya tidak ada perbedaan.

### **3.2. PEMBAHASAN**

#### **Hubungan antara Biaya Pendidikan dengan Penilaian Kepuasan**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan. Penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan prosesnya, untuk selalu meningkatkan pelayanannya maka diperlukan suatu monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Tujuan dan maksud tersebut utamanya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap barang dan atau jasa yang ditawarkan.

Kepuasan pengguna layanan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu Instansi/Lembaga karena masyarakat adalah konsumen dari produk dan atau jasa yang dihasilkannya. Untuk mengukur kepuasan masyarakat digunakan atribut yang berisi tentang bagaimana masyarakat menilai suatu produk atau layanan yang ditinjau dari sudut pandang pelanggan. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Untuk mengukur tingkat kepuasan peserta didik terhadap layanan yang diberikan maka penulis melakukan survei kepuasan peserta didik. Namun utamanya penulis akan menyajikan biaya sebagai pengamatan utama dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui kepuasan peserta didik dalam pelayanan yang diberikan, maka penulis menggunakan pedoman penyusunan indek kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit penyelenggara pelayanan publik tentunya telah diatur dalam penyusunannya, salah satunya adalah unsur SKM dalam pertanyaan/ kuesioner yang diajukan. Selanjutnya unsur tersebut diolah dalam bentuk pertanyaan yang akan diisi oleh pengguna jasa layanan atau disebut sebagai responden. Secara umum ruang lingkup kuesioner yang disusun meliputi 9 (sembilan) unsur layanan yaitu:

- a. Persyaratan;
- b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
- c. Waktu Penyelesaian;
- d. Biaya/Tarif;
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- f. Kompetensi Pelaksana;
- g. Perilaku Pelaksana;
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
- i. Sarana dan prasarana.

Dari pedoman tersebut, didapatkan beberapa pedoman untuk penyusunannya seperti untuk meenyajikan hasil dari penilaian indeks kepuasan pelanggan/ peserta didik. Beberapa pedoman tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Metode Pengumpulan data Pengumpulan dan pengisian data SKM dalam pengamatan ini adalah dengan cara metode e-surevy, yaitu survey yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik.
- b. Skala perhitungan Jawaban  
 Nilai Persepsi 1 adalah Kategori Tidak Baik/Tidak Sesuai/Tidak Mudah  
 Nilai Persepsi 2 adalah Kategori Kurang Baik/ Kurang Sesuai/ Kurang Mudah  
 Nilai Persepsi 3 adalah Kategori Baik/Sesuai/Mudah  
 Nilai Persepsi 4 adalah Kategori Sangat Baik/ Sangat Sesuai/ Sangat Mudah

c. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data hasil pengisian kusioner dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan prosedur metode pengolahan data sebagai berikut. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata unsur terlebih dahulu, untuk menentukan nilai rata-rata unsur tersebut maka dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai rata – rata per unsur} = \frac{\text{Jumlah Nilai unsur}}{\text{Jumlah Responden}}$$

Keterangan : Jumlah nilai unsur adalah jumlah keseluruhan hasil nilai per pertanyaan

Lalu setelah ditemukannya jumlah Nilai rata-rata per unsur, maka ditentukan Nilai rata-rata indeks/ IKM. Perhitungan nilai tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Nilai rata rata IKM perunsur} = \frac{1}{9} \times \text{Nilai Rata rata perunsur}$$

$$\text{Nilai rata-rata IKM} = \text{Jumlah keseluruhan nilai rata-rata IKM per unsur}$$

Setelah mengetahui Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat maka untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) skala nilai antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut harus dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Nilai IKM Konversi} = \text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

d. Kategori Hasil Pengukuran IKM

Setelah pengolahan dan analisis data didapatkan nilai-nilai seperti NI, NIK, Mutu Layanan dan Kinerja Unit Layanan, yang kemudian dirangkum dalam tabel. Berikut adalah **Tabel 6** Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan:

**Tabel 6.** Nilai Interval (NI), Nilai Interval Konversi (NIK), Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Layanan (x)	Kinerja Unit Layanan (y)
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Dari **Tabel 6**, pengurutan dari nilai persepsi 1 adalah kategori yang tidak baik sampai dengan nilai persepsi 4 yang merupakan kriteria sangat baik. Selanjutnya penulis mengambil survei sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada Triwulan I dan II Tahun 2020, adapun hasil survey tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1) Hasil Survei Triwulan 1 (satu) Tahun 2020

Survei yang dilaksanakan pada Peserta didik di Triwulan I (satu) melibatkan 424 Responden. Adapun hasil survei tersebut ditampilkan pada **Tabel 7** berikut ini.

**Tabel 7.** Tabel Nilai IKM Triwulan I (satu)

No	Unsur Pelayanan	Nilai Pelayanan	Unsur
1	Pernyataan	3.40	Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.35	Baik
3	Waktu	3.24	Baik
4	Biaya/Tarif	3.35	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.37	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3.38	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.43	Baik
8	Penanganan Pengaduan. Saran dan Masukan	3.35	Baik
9	Sarana dan Prasarana	3.32	Baik
<b>Nilai Indeks Kepuasan</b>			3.32
<b>Nilai Indeks Setelah dikonversi</b>			83.85
<b>Mutu Layanan</b>			B
<b>Kinerja layanan</b>			Baik

Dari hasil survei pada **Tabel 7**, terhadap layanan diklat pembentukan, diketahui bahwa mutu layanan termasuk dalam kategori B dengan kinerja unit layanan Baik. Adapun nilai rata-rata (NRR) unsur layanan adalah 3.32 dari skala 4.

Hal ini berarti bahwa secara umum Taruna sebagai pengguna jasa layanan diklat pembentukan menilai layanan yang diterima dalam kategori yaitu "BAIK". Unsur layanan Perilaku pelaksana mendapatkan nilai tertinggi yakni 3.43 adapun unsur yang memiliki nilai paling terendah adalah unsur waktu sebesar 3,24.

Unsur layanan yang tertinggi dapat menjadi acuan agar unsur lainnya melakukan perbaikan. Sedangkan untuk unsur waktu akan dievaluasi lebih lanjut lagi terhadap pelaksanaan kegiatan diklat pembentukan dari pelayanan yang diberikan kepada peserta didik.

## 2) Hasil Survei Triwulan 2 (dua) Tahun 2020

Survei yang dilaksanakan pada Peserta didik di Triwulan II (dua) melibatkan 313 Responden. Adapun hasil survei tersebut ditampilkan pada **Tabel 8** berikut ini.

**Tabel 8.** Tabel Nilai IKM Triwulan II (dua)

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	
		Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3.46	Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.42	Baik
3	Waktu	3.35	Baik
4	Biaya/Tarif	3.40	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.41	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3.43	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.46	Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.42	Baik
9	Sarana dan Prasarana	3.39	Baik
<b>Nilai Indeks Kepuasan</b>		3.32	
<b>Nilai Indeks Setelah dikonversi</b>		83.85	
<b>Mutu Layanan</b>		B	
<b>Kinerja layanan</b>		Baik	

Dari hasil survei pada **Tabel 8**, terhadap layanan diklat pembentukan, dalam hal ini adalah Peserta didik, diketahui bahwa mutu layanan termasuk dalam kategori B dengan kinerja unit layanan Baik. Adapun nilai rata-rata (NRR) unsur layanan adalah 3.42 dari skala 4. Hal ini berarti bahwa secara umum Taruna sebagai pengguna jasa layanan diklat pembentukan menilai layanan yang diterima dalam kategori yaitu "BAIK".

Unsur layanan Persyaratan dan Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi yakni 3.46 adapun unsur yang memiliki nilai paling terendah adalah unsur waktu sebesar 3,35. Unsur layanan yang tertinggi dapat menjadi acuan unsur lainnya agar melakukan perbaikan sedangkan untuk unsur waktu akan dievaluasi lebih lanjut lagi terhadap pelaksanaan kegiatan diklat pembentukan dari pelayanan yang diberikan kepada Taruna.

Selanjutnya penulis melakukan perbandingan antara nilai indeks per unsur layanan pada triwulan I Tahun 2020 dengan nilai indeks per unsur layanan tahun 2020 triwulan II. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan pada nilai indeks per unsur layanan. Perbandingan tersebut ditampilkan pada **Tabel 9** berikut ini.



**Tabel 9.** Tabel Perbandingan Nilai IKM Triwulan I dan II

Unsur Pelayanan	Unsur Layanan		Keterangan
	Tahun 2020 Tri I	Tahun 2020 Tri II	
Persyaratan	3.40	3.46	Naik 0.06 poin
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.35	3.42	Naik 0,07 poin
Waktu	3.24	3.35	Naik 0.11 poin
Biaya/Tarif	3.35	3.40	Naik 0.05 poin
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.37	3.41	Naik 0.04 poin
Kompetensi Pelaksana	3.38	3.43	Naik 0.05 poin
Perilaku Pelaksana	3.43	3.46	Naik 0.03 poin
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.35	3.42	Naik 0.07 poin
Sarana dan prasarana	3.32	3.39	Naik 0.07 poin
Nilai IKM	3.32	3.42	Naik 0.07poin
Nilai IKM Konversi	83.85	85.41	

Dari **Tabel 9**, diketahui adanya peningkatan atau penurunan pada nilai indeks per unsur layanan pada triwulan I Tahun 2020 dengan nilai indeks per unsur layanan tahun 2020 triwulan II. Diketahui bahwa adanya peningkatan pada nilai indeks setiap unsur layanan dari triwulan I ke triwulan II pada Tahun 2020.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan beberapa simpulan yang telah dideskripsikan dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Biaya yang relatif tinggi pada instansi penyelenggaraan pendidikan dibidang maritim dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti kebutuhan sarana dan prasarana, produk yang dihasilkan dan sebagainya, selain itu adalah program studi yang memiliki nilai kekhususan tertentu menjadi faktor adanya dukungan praktek dan peningkatan kompetensi dan keahlian yang membuat penambahan biaya.

Pengamatan yang dilakukan pada peserta didik program reguler menunjukkan bahwa tarif layanan yang diberikan adalah terjangkau dengan yang dibayarkan. Pada pengamatan ini banyak dari peserta didik menilai tarif yang diberikan PIP Semarang tidak memberatkan peserta didik. Dari pengamatan terhadap penanggung jawab biaya. Peserta didik program reguler, disimpulkan penyelesaian pendidikannya. Dengan demikian hal tersebut menjadi perhatian utama terhadap tarif/biaya pada peserta didik program mandiri.

Waktu pengamatan yang dilakukan oleh penulis adalah pada saat berlangsungnya pandemic Covid-19. Hal tersebut tentunya berdampak pada hasil penilaian karena hamper banyaknya penilaian dari peserta didik untuk meminta adanya keringanan biaya pada

program pendidikan karena beberapa factor yang disebabkan dari dampak pandemik tersebut.

Penilaian kepuasan peserta didik merupakan penilaian yang diambil dari beberapa unsur sesuai dengan pedoman peraturan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam hal tersebut, penilaian pembiayaan turut menjadi alat ukur penilaian sehingga dalam aspek pembiayaan akan mempengaruhi penilaian kepuasan peserta didik yang tentunya akan berpengaruh pada mutu/ kualitas layanan pendidikan

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, R. T. E., Harun, C. Z., & Ibrahim, S. (2016). Analisis penetapan standar biaya pendidikan pada SMA Negeri 2 Kuala kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(1), 119-128.
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(2), 26-36.
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 565-578.
- Gamar, N. (2019). Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan (study kasus MTS Darul Khair Masing, kec. Batui, kab. Banggai, Sulawesi Tengah). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 11-20.
- Lubis, D. I. D., & Hidayat, R. (2019). Pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(1), 15-24.
- Murti, T. K. (2019). Pengaruh brand image, promosi dan biaya pendidikan terhadap keputusan mahasiswa melanjutkan studi pada program studi pendidikan ekonomi. *Edunomic: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan dan Sains*, 7(2), 102-107.
- Togatorop, M. (2017). Pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu sekolah SMA Swasta. *SCHOLARIA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(3), 234-240.
- Winarsih, S. (2016). Kebijakan dan implementasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. *International Conference of Moslem Society*, 124-135.
- Yayuk, S., & Sugiyono, S. (2019). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan biaya pendidikan terhadap kualitas proses belajar mengajar dan dampaknya dengan kompetensi lulusan SMK di kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(1), 84-96.
- Yuliani, H. (2016). Pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngrojo. *Jurnal Hanata Widya*, 5(4), 54-68.